



2019

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN**



**JL. TERATAI NO 2, KP. PONDOK, KLATEN
TELEPON (0272) 321-647, FAX 321-647
KODE POS 57411**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispermasdes Kab. Klaten disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dispermasdes Kab. Klaten sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Klaten, Januari 2020

KEPALA DISPERMASDES KAB. KLATEN



JAKA PURWANTO, S.Sos.MM
NIP. 19671011986031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Pembuatan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis Organisasi.....	6
A. Tujuan dan Sasaran Dispermasdes Kabupaten Klaten.....	6
B. Program dan Indikator Program	8
2.2. Perjanjian Kinerja	10
A. Perjanjian Kinerja Eselon	10
B. Penetapan Program dan Anggaran.....	11
BAB III. AKUNTABILITASKINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja tahun 2019.....	13
3.2. Penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan PK	19
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	20
A. Sumber Daya Manusia	20
B. Sarana dan Prasarana	22
C. Anggaran	23
BAB IV. PENUTUP.....	27
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Saran	27
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dispermasdes Kabupaten Klaten	5
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Dispermasdes Kabupaten Klaten	7
Tabel 2.2. Indikasi Rencana Program Di Dispermasdes Kabupaten Klaten	8
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2019	11
Tabel 3.1. Sekala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...	13
Tabel 3.2. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dispermasdes Klaten	14
Tabel 3.3. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Dispermasdes Kabupaten Klaten	15
Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dispermasdes Kabupaten Klaten	16
Tabel 3.5. Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 3.6. Data Personil Berdasarkan Pangkat / Golongan	21
Tabel 3.7. Sarana dan Prasarana Dispermasdes Kabupaten Klaten	22
Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dispermasdes Kabupaten Klaten Tahun 2019	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dispermasdes Kab. Klaten.
2. Mendorong Dispermasdes Kab. Klaten di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dispermasdes Kab. Klaten untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dispermasdes Kab. Klaten di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum Pembuatan LKjIP

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur penunjang dan pelaksanaan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan program kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

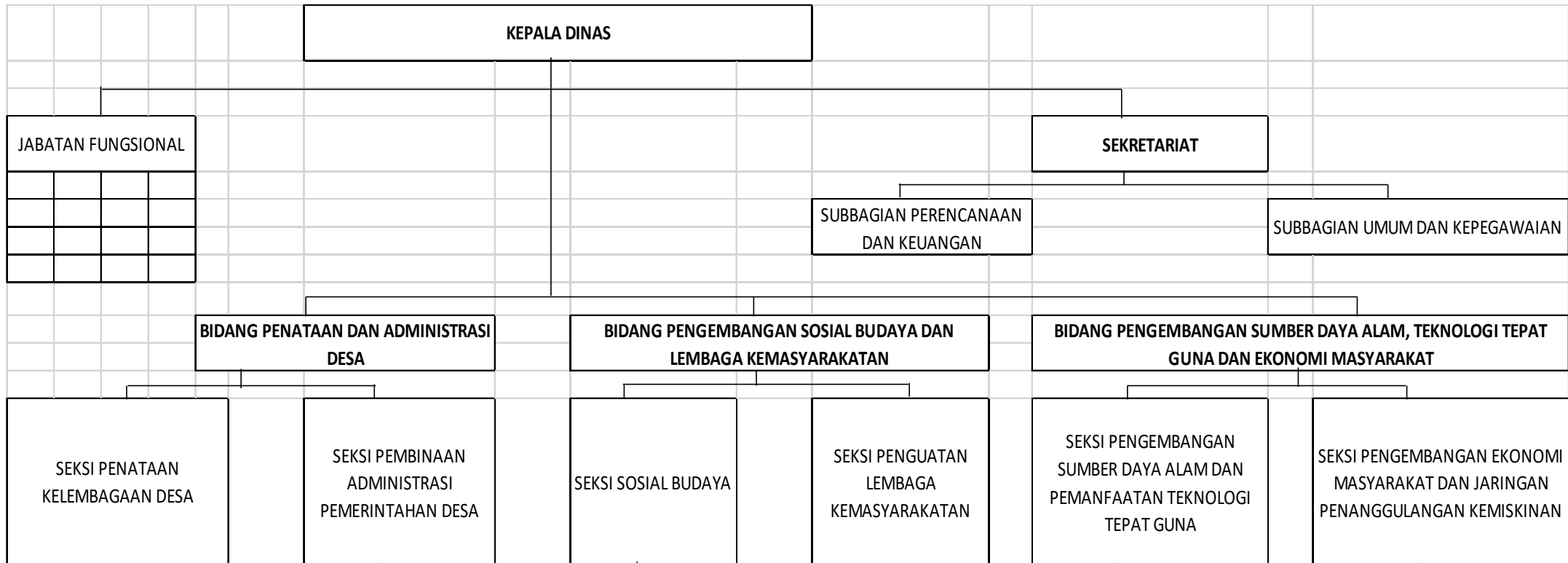
Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Klaten menyelenggarakan fungsi:

- 1) Fasilitasi Peningkatan dan pemantapan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.
- 2) Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui Bimbingan teknis, sosialisasi.
- 3) Fasilitasi peningkatan lingkungan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA).
- 4) Fasilitasi peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat, sosial budaya.
- 5) Fasilitasi pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten, meliputi :

- a. Kepala.
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pengembangan SDA, TTG dan Ekonomi
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Bidang Pemerintahan Desa

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN



1.4 Permasalahan Utama yang dihadapi Dispermasdes Kabupaten Klaten

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dispermasdes Kabupaten Klaten sebagai tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Permasalahan Dispermasdes Kabupaten Klaten

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Aparat / perangkat desa baru belum menguasai aplikasi siskeudes	Meyelenggarakan bintek siskeudes bagi perangkat desa baru.	Pendampingan aplikasi
2	Belum ada kelengkapan dan peralatan untuk mendukung kegiatan SID	Penyusunan draf perbup SID dan mengusulkan kelengkapannya	Implementasi perbup
3	Inventarisasi tanah kas/asset desa belum maksimal	Mendampingi desa dalam menginventarisasi asset	Menata aset kas desa/asset desa

1.5. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Hal ini disebabkan analisis isu strategis merupakan salah satu dasar perumusan misi pembanguna. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis di harapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Dispermasdes dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dispermasdes Kabupaten Klaten adalah :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dan pemerintahan desa;
3. Pengembangan teknologi tepat guna dalam mendukung perekonomian masyarakat;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

A. Tujuan dan Sasaran Dispermasdes Kabupaten Klaten.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu enam tahun, yaitu periode 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RPJMD 2016- 2021 telah mengalami 1 (satu) kali perubahan, yaitu pada Tahun 2019.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2016-2021 menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dispermasdes Kab. Klaten Tahun 2016-2021. Sehingga terdapat penyesuaian target capaian kinerja yang ada di sasaran Dispermasdes Kab. Klaten.

Tujuan, sasaran serta indikator tujuan/sasaran Dispermasdes Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah

TABEL II.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					
			PADA TAHUN KE					
			1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15%	31%	46%	72%	87%	100%
2	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	19%	27%	35%	42%	50%	58%
3	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16%	33%	49%	66%	83%	100%

B. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM DISPERMASDES

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan program tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan (input) atau menghasilkan keluaran (*output*), dan bersifat indikatif yang mempunyai maksud data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Program dan Indikator Kinerja Program Dispermasdes Kabupaten Klaten yang mendukung Sasaran Dispermasdes Kabupaten Klaten adalah sebagaimana terlihat pada table di bawah.

Tabel 2.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM DISPERMASDES KAB. KLATEN

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun n 2019	Tahun n 2019	Tahun n 2020	Tahun n 2021
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	13%	35%	47%	77%	89%	100%

	an Desa / Kelurahan							
2	Program Tata Kelola Pemerintah Desa	Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	15%	31%	46%	72%	87%	100%
3	Program peningkatan pemberdaya an masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	7%	29%	46%	64%	82%	100%
4	Program pengemban gan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase peningkatan pembentuk an BUMDes	29%	43%	51%	58%	64%	70%
5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	7%	7%	17%	33%	67%	100%
6	Program pemberdaya an dan kesejahtera an keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	26%	39%	52%	65%	78%	91%
7	Program Peningkatan	Prosentase peningkatan	0	0	0	100%	0	0

	Kapasitas Aparatur Pemerintah an Desa	administrasi perencanaan desa						
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

2.2. Perjanjian Kinerja

A. Perjanjian Kinerja Eselon

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan komitmen dari Kepala Dispermasdes Kab. Klaten untuk mencapai target Indikator Sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu mencapai Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja Eselon III merupakan komitmen dari Kepala Bidang untuk mencapai target Indikator Program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Kepala Dispermasdes Kab. Klaten.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Eselon IV merupakan komitmen dari para Kasie untuk melaksanakan semua kegiatan yang diampu, sehingga realisasi capaian program bisa tercapai.

Rincian Perjanjian Kinerja baik Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV pada Dispermasdes Kabupaten Klaten Tahun 2019 tersebut dalam lampiran laporan ini.

Adapun indikator yang mendukung Sasaran Kepala Dispermasdes Kab. Klaten adalah:

Tabel II.3.

Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72
Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	%	42
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	66

B. Penetapan Program dan Anggaran

Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 ada sepuluh (10) program, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	680.148.050,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	551.664.000,-
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.428.250,-

4	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/ kelurahan	192.195.726,-
5	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.767.704.150,-
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	848.214.582,-
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	394.500.000,-
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	884.995.242,-
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000,-
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	901.000.000,-
10	Program peningkatan kualitas perencanaan	22.000.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1

Skala Pengukuran Kinerja Progresif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI	KODE
1	Lebih dari 90,01%	Sangat Tinggi	
2	75,01% – 90%	Tinggi	
3	65,01% – 75 %	Sedang	
4	50,01%-65,00%	Rendah	
5	Kurang dari 55 %	Sangat Tinggi	

Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Klaten Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dispermasdes Kab Klaten.

Sasaran strategis yang di tetapkan Dispermasdes Kab klaten Tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel dengan indikator Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel sebesar 72 %.
2. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan indicator Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa sebesar 42 %.
3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan social dengan indicator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan) sebanyak 66 %.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dispermasdes Kabupaten Klaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	71	98
2	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	%	42	42	100
3	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	66	58	89
<i>Total Capaian</i>						96

Tabel 3.3

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Dispermasdes Kabupaten Klaten

- Sasaran Kinerja : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel
- Sasaran Kinerja : Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan
- Sasaran Kinerja : Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (n-1)	Kandisi Tahun 2019 (n)			Capaian s/d Tahun 2019 (n)	Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun (n) Terhadap Target Akhir Tahun Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 6 / 5 x 100%	(8)	(9)	(10)=8/9 x 100%
1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15%	104	72	71	98	71	100%	71
2	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	12%	100	42	42	100	42	58%	72
3	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16%	100	66	58	89	58	100%	58
Total Capaian			101			96	57	86%	66

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dispermasdes Kab. Klaten Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Kinerja			Program	Anggaran			
				Rencana	Realisasi	(%)		Rencana	Realisasi	%	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	71	98	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	680,148,050	641,912,457	94
II	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	%	42	42	100	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	551,664,000	535,042,477	97
III	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	66	58	89	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,428,250	10,097,350	97
							4	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/ kelurahan	192,195,726	156,774,166	82
							5	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	2,767,704,150	2,117,954,375	77
							6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	848,214,582	738,537,184	87
							7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	394,500,000	319,845,051	81
							8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	884,995,242	840,595,105	95
							9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	100,000,000	94,170,275	94
							10	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	901,000,000	874,958,316	97
							11	Program peningkatan kualitas perencanaan	22,000,000	21,121,250	96
Toatal Capaian						96	Total Anggaran		7,352,850,000	6,351,008,006	86

Keterangan dan perhitungan capaian kinerja:

1. Untuk penghitungan prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel, menggunakan pengukuran Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu di bagi jumlah desa di Kab. Klaten.

Pada tahun 2019 yang ditargetkan Dispermasdes Kab.Klaten sebanyak 280 desa yang menyampaikan Laporan Keuangan 2019 secara tepat waktu. Sampai batas pengumpulan laporan keuangan Desa yang telah terkumpul sebanyak 277 desa. Dengan jumlah tersebut Dispermasdes Kab. Klaten tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.

2. Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa di hitung dengan pengukuran Jumlah Posyantek antar desa di bagi jumlah kecamatan, Sampai dengan tahun 2019 di targetkan Kab. Klaten telah memiliki 11 Posyantek.

Jumlah Posyantek dan Posyantek antar desa yang di miliki Kab. Klaten sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Posyantek Kec, Bayat
2. Posyantek Kec Kalikotes
3. Posyantek Kec. Ngawen
4. Posyantek Kec. Kemalang
5. Posyantek Kec. Tulung
6. Posyantek Kec. Karanganom
7. Posyantek Kec. Polanharjo
8. Posyantek antar desa Kec. Wedi
9. Posyantek antar desa Kec. Cawas
10. Posyantek antar desa Kec. Trucuk
11. Posyantek antar desa Kec Manisrenggo

Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di sebutkan bahwa Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selajutnya di sebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG

Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis , informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Berdasarkan hal tersebut di atas adanya mulai tahun 2019 ada perbedaan nomenklatur penyebutan Posyantek menjadi Posyantek Antar Desa

Dari data tersebut Dispermasdes telah mampu mencapai target yang di tetapkan yaitu pembentukan Posyantek/Posyantek Antar Desa sebanyak 11 Posyantek/Posyantek Antar Desa.

3. Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan) di hitung dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif di dibandingkan dengan Jumlah kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya dalam satu periode RPJMD.

Sampai tahun 2019 ditargetkan Dispermasdes Kab. Klaten melakukan pembinaan kepada Kader lembaga pemberdayaan Masyarakat sebanyak 7.820 KPMD (1955 KPMD pertahun dari tahun 2016, 2017 ,2018,2019) dan Pengurus kelompok pelestarian adat dan social budaya sebanyak 50 pengurus.

Melalui kegiatan pendampingan KPMD dan Adat Istiadat dan Nilai Sosial dispermasdes Kab. Klaten telah melaksanakan pembinaan kepada KPMD dan Pengurus Kelompok pelstarian adat istiadat dan social budaya. Sehingga Dispermasdes telah mecapai target yang di tetapkan yaitu memberikan pembinaan kepada 782 KPMD dan 306 Pengurus kelompok pelestarian adat budaya.

3.2. Penyebab Keberhasilan dan Ketidak berhasilan Pencapaian Kinerja

Dari 3 Capaian indikator kinerja utama (indikator sasaran) Dispermasdes Kab. Klaten tersebut ada indicator yang tercapai dan tidak tercapai, indikator yang dapat tercapai yaitu Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa, karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pembentukan Posyantek / Posyantek antar desa berupa fasilitasi pembentukan dan pembinaan;
2. Adanya Peran aktif Dispermasdes, TA P3MD dan pendamping desa;

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Tidak semua Posyantek yang sudah di bentuk dapat memahami dan menjalankan tupoksinya;
2. Ketersediaan dana untuk operasional Posyantek yang relative masih kurang atau bahkan belum ada sama sekali;
3. Kegiatan TTG secara umum dan kelembagaan Posyantekdes belum sepenuhnya mendapat perhatian yang serius di tingkat Kecamatan dan Desa.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Peningkatan kapasitas pengurus posyantekdes melalui rapat koordinasi, Bimtek dan Pelatihan;
2. Perlu pengenalan kegiatan TTG melalui pelatihan dan bantuan peralatan secara langsung, sehingga ada aktifitas usaha ekonomi bagi Posyantekdes;
3. Sosialisasi dan dukungan kebijakan serta pendanaan bagi kegiatan-kegiatan pengembangan SDA di Desa, sehingga posyantekdes yang sudah terbentuk dapat aktif berinovasi dalam pengembangan SDA hingga bernilai guna.

Sedangkan Capaian indikator kinerja utama (indikator sasaran) Dispermasdes Kab. Klaten yang tidak tercapai yaitu prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel dan Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan), karena beberapa hal, diantaranya:

1. Kemampuan perangkat desa khusus pengampu SISKEUDES masih perlu ditingkatkan;
2. Belum maksimalnya pelaksanaan rapat koordinasi pembinaan bagi Kader.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Peningkatan pemahaman penggunaan SISKEUDES;
2. Peningkatan kompetensi bagi Kader.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Melaksanakan bimtek / pelatihan untuk perangkat desa;
2. Melaksanakan rakor & pembinaan secara berkala 3 bulan sekali.

3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian Sasaran atau Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya yang dimiliki meliputi 3 (tiga) sumber daya yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran.

A. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia mempengaruhi kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dispermasdes Kabupaten Klaten didukung oleh 36 Aparatus Sipil Negara (ASN). Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari

Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang sebagaimana tertuang dalam tabel III.5 dan III.6 berikut :

Tabel III.5

Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Ket
1.	SD	- pegawai	0 %	Didominasi tingkat SMA sebanyak 33,33 %
2.	SMP	- pegawai	0 %	
3.	SMA	12 pegawai	33,33 %	
4.	D-III	3 pegawai	8,33 %	
5.	S-1	10 pegawai	27,78 %	
6.	S-2	11 pegawai	30,56 %	
	Jumlah	36 pegawai	100,00 %	

Tabel III.6

Data Personil Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Gol	Jumlah	Prosentase	Ket
1.	Juru Muda	Ia	- pegawai	0,00 %	Prosentase tertinggi adalah Gol /Ruang III b (Penata Muda Tk.I) sebesar 36,11 %
2.	Juru Muda Tk. I	Ib	- pegawai	0,00 %	
3.	Juru	Ic	- pegawai	0,96 %	
4.	Juru Tk. I	Id	- pegawai	0,00 %	
5.	Pengatur Muda	IIa	- pegawai	0,00 %	
6.	Pengatur Muda Tk. I	IIb	2 pegawai	5,55 %	
7.	Pengatur	IIc	- pegawai	0 %	
8.	Pengatur Tk. I	IId	- pegawai	0 %	
9.	Penata Muda	IIIa	2 pegawai	5,55 %	
10.	Penata Muda Tk. I	IIIb	13 pegawai	36,11 %	
11.		IIIc	3 pegawai	8,33 %	

12.	Penata	IIIId	6 pegawai	16,66 %	
13.	Penata Tk. I	IVa	9 pegawai	25,00 %	
14.	Pembina	IVb	- pegawai	0 %	
15.	Pembina Tk. I	IVc	1 pegawai	2,78 %	
	Pembina Utama Muda				
	Jumlah		36 pegawai	100 %	

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu factor pendukung bagi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu di siapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaranaktifitas pegawai. Adapun sarana dan prasarana di Dispermasdes Kabupaten Klaten menurut jenisnya sebagai tersebut dalam table III.7 berikut:

Tabel III.7

Sarana dan Prasarana Dispermasdes Kab Klaten

NO	JENIS ASET/BARANG	JUMLAH BARANG	KET
1.	Gedung dan Bangunan	1 unit	
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	7 unit	-
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	-
4.	Lemari Kerja	Unit	-
5.	Meja kerja	Unit	-
6.	Kursi Kerja	Unit	-
7.	Air Conditioner	Unit	-
8.	Komputer/PC	Unit	-

9.	Laptop	Unit	-
10.	Printer	Unit	

C. Anggaran

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 6.351.008.006,- atau 86,37 % dari total pagu sebesar Rp. 7.352.850.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,63 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis di atas sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Klaten yaitu:

- I. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai penunjang/pendukung dari pencapaian kinerja instansi dengan tingkat capaian 94 %
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan untuk menambah jumlah sarana prasarana pendukung operasional kantor sebagai penunjang / pendukung dari pencapaian kinerja instansi. Prosentase capaian sebesar 96 %. Kegiatan tersebut antara lain:
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Keuangan dengan kegiatan yang sifatnya sebagai penunjang pencapaian kinerja instansi.
- IV. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat ,antara lain:
 - Peningkatan implementasi pemberdayaan masyarakat pedesaan (BBGRM)
 - Peningkatan koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

- V. Program pengembangan lembaga ekonomi ,antara lain:
 - Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
- VI. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan tingkat capaian di atas 94 % antara lain:
 - Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu
 - Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial
- VII. Program peningkatan kesejahteraan keluarga , dengan tingkat capaian 97 %, antara lain:
 - Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong
 - Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi
 - Peningkatan koordinasi pokja sandang pangan dan tata laksana rumah tangga
 - Peningkatan koordinasi pokja kesehatan perencanaan sehat dan pelestaraan lingkungan hidup
- VIII. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan kegiatan yang sifatnya pendukung penunjang pencapaian kinerja instansi
- IX. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/ kelurahan ,antara lain:
 - Pembekalan , bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
- X. Program peningkatan tata kelola pemerintahan desa , antara lain :
 - Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran/indicator kinerja utama adalah sebagai tabel III.8 berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dispermasdes Kab. Klaten Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Kinerja			Program	Anggaran			
				Rencana	Realisasi	(%)		Rencana	Realisasi	%	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	71	98	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	680,148,050	641,912,457	94
2	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	%	42	42	100	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	551,664,000	535,042,477	97
3	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	66	58	89	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,428,250	10,097,350	97
							4	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/ kelurahan	192,195,726	156,774,166	82
							5	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	2,767,704,150	2,117,954,375	77
							6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	848,214,582	738,537,184	87
							7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	394,500,000	319,845,051	81
							8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	884,995,242	840,595,105	95
							9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	100,000,000	94,170,275	94
							10	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	901,000,000	874,958,316	97
							11	Program peningkatan kualitas perencanaan	22,000,000	21,121,250	96
Toatal Capaian						96	Total Anggaran		7,352,850,000	6,351,008,006	86

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis dan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Klaten, pada tahun anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.7.352.850.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kab Klaten.

Realisasi total anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4,272,393,073,- atau 81,65 % dari total pagu sebesar Rp. 5.232.663.150,-. Realisasi total anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.351.008.006,- atau 86,37 % dari total pagu sebesar Rp. 7.352.850.000,-. Sehingga apabila dibandingkan tahun 2018 maka terjadi Kenaikan sebesar 4,72 % dalam hal penyerapan anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten yang merupakan bentuk laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Memperhatikan data pencapaian kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dispermasdes dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (**Sangat Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

🚩 Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) mencapai 96 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4.2 SARAN

Dalam menunjang penerapan sistem SAKIP yang baik maka perlu mengatasi berbagai persoalan sebagaimana diuraikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pemahaman kapasitas pejabat structural tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Klaten, Januari 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa Kab. Klaten



JAKA PURWANTO, S.Sos. MM

NIP. 198711011986031001

LAMPIRAN

Keputusan Kepala
DISPERMASDES tentang
Penetapan Indikator Utama
(IKU) DISPERMASDES
Tahun 2019

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI

**LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN PROGRAM
KEGIATAN**

RENCANA STRATEGIS

REVIEW RENCANA STRATEGIS

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan

Cascading
DISPERMASDES
Kabupaten Klaten